

## DAFTAR BACAAN

### I. Buku-buku

- As'Adi Edi, Hukum Proyek Konstruksi Bangunan : Dalam Perspektif Pelayanan Publik yang Baik di Indonesia, Graha Ilmu, Jakarta 2011.
- Badruzaman Mariam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 2001.
- Badruzaman Mariam Darus, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni Bandung, 1993
- Fuady Munir, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak dari Sudut pandang Hukum Bisnis Jilid 1*, cetakan 3, pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Hernoko Agus Yudha, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, cetakan ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2013
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, edisi pertama, cetakan ke-6, kencana, Jakarta, 2010.
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, edisi revisi, cetakan ke-5, kencana, Jakarta, 2013.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, edisi ke 2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2006
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku ke 1, cetakan Syaifuddin Muhammad, *Hukum Kontrak (Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum)*, cetakan ke-1, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Salim, *Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cetakan ke 8, Sinar Grafika, 2011.
- Simamora Y Sogar., 2012. *Hukum Kontrak (Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia)*, Edisi kedua, Kantor Hukum Wins & Partner, Surabaya, 2012. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan VI, Intermedia, Jakarta. 1979.

Sjahdeini Sutan Remy, Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, Institut Bankir Indonesia (IBI) Jakarta 1993.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet. ke-XXXIII, PT. Intermedia, Jakarta 2005.

Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media, Jakarta 2004.

Sunandar Taryana, Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis International, Sinar Grafika, Jakarta, , 2004.

Syahrani Riduan, Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata, Alumni Bandung 2000

#### **i. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan ke empat (Lembaran Negara RI Tahun 2006, Nomor 14);

Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 1) ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 1999 tanggal 7 Mei 1999, tentang Jasa Konstruksi, (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60) ;

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 No.134);

Undang- Undang Nomor UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000, tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi, ; (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 07/PRT/M/2011 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultansi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 64);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor ...)

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor ...)

Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 155)

Peraturan Presiden Nomor : 172 Tahun 2014, Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 368)

Peraturan Presiden Nomor : 4 Tahun 2015, Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 5);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.